

**KONSEP DASAR DAN
IMPLEMENTASI
PENGARUSUTAMAAN
GENDER DI PROVINSI JAMBI
(SESI I)**

**Dra. LUTHPIAH
KEPALA DINAS P3AP2 PROVINSI JAMBI**

KONSEP DASAR DAN IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DI PROVINSI JAMBI (6 JAMLAT)

TUJUAN PEMBELAJARAN	1.	PESERTA DAPAT MEMAHAMI PERBEDAAN PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI SECARA BIOLOGIS DAN KONSTRUKSI SOSIAL BUDAYA
	2.	PESERTA MEMAHAMI KONSEP GENDER
	3.	PESERTA DAPAT MEMAHAMI PERBEDAAN KEBUTUHAN PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI
	4.	PESERTA MEMAHAMI ISU-ISU GENDER
	5.	PESERTA DAPAT MEMAHAMI STRATEGI ISU GENDER DALAM KEBIJAKAN DAERAH MELALUI PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DAN AFFIRMATIVE ACTION
	6.	PESERTA DAPAT MEMAHAMI OPTIMALISASI PERAN KELOMPOK KERJA (POKJA)PUG

OUTPUT	PESERTA MAMPU MERUMUSKAN ISU STRATEGIS GENDER SESUAI DENGAN KEBIJAKAN DAERAH
---------------	---

POKOK BAHASAN 1	PERBEDAAN PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI
1.1	PERBEDAAN BIOLOGIS PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI
1.2	PERBEDAAN PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI SEBAGAI HASIL KONSTRUKSI SOSIAL BUDAYA

1.1. PERBEDAAN BIOLOGIS PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI

PEREMPUAN

CIRI PRIMER

- MEMILIKI VAGINA
- MEMILIKI OVARIUM (INDUNG TELUR)
- MEMPRODUKSI OVUM (SEL TELUR)
- MEMILIKI UTERUS
- MENGALAMI MENSTRUASI
- MEMILIKI KROMOSOM XX

CIRI SEKUNDER

- KULIT HALUS
- SUARA HALUS
- DADA BESAR
- DLL

LAKI-LAKI

CIRI PRIMER

- MEMILIKI PENIS
- MEMILIKI KANTUNG ZAKAR
- MEMILIKI BUAH ZAKAR
- MEMPRODUKSI SPERMA
- PROSTAT
- MEMILIKI KROMOSOM XY

CIRI SEKUNDER

- BULU DADA
- JAKUN
- SUARA BERAT
- BERKUMIS
- DLL

BERSIFAT KODRATI, TIDAK DAPAT BERUBAH, TIDAK DAPAT DITUKAR, BERLAKU SEPANJANG ZAMAN, CIPTAAN TUHAN

1.2. PERBEDAAN PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI SEBAGAI HASIL KONSTRUKSI SOSIAL BUDAYA

PEREMPUAN		PERBEDAAN		LAKI-LAKI
SEKTOR DOMESTIK, MEMASAK, MENCUCI, MENYETRIKA	>	PERAN	<	SEKTOR PUBLIK, BEKERJA Mencari NAFKAH DI LUAR RUMAH
PENCARI NAFKAH TAMBAHAN	>	FUNGSI	<	PENCARI NAFKAH UTAMA
IBU RUMAH TANGGA	>	TANGGUNG JAWAB	<	KEPALA KELUARGA
PEMININ	>	SIKAP	<	MASKULIN
EMOSIONAL, RAGU- RAGU, PASIF, LEMAH	>	PERILAKU	<	RASIONAL, TEGAS, AGRESIF, KUAT

**DAPAT BERUBAH, DAPAT DITUKAR, BERGANTUNG WAKTU,
BUATAN MANUSIA, TIDAK BERSIFAT KODRATI**

POKOK BAHASAN 2	KONSEP GENDER
2.1	PENGERTIAN GENDER
2.2	TEORI GENDER
2.3	DASAR HUKUM

2. KONSEP GENDER

2.1. PENGERTIAN

PERBEDAAN-PERBEDAAN SIFAT, PERANAN, FUNGSI, DAN STATUS ANTARA PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI YANG BUKAN BERDASARKAN PADA PERBEDAAN BIOLOGIS, TETAPI BERDASARKAN RELASI SOSIAL BUDAYA YANG DIPENGARUHI OLEH STRUKTUR MASYARAKAT YANG LEBIH LUAS. JADI, GENDER MERUPAKAN KONSTRUKSI SOSIAL BUDAYA DAN DAPAT BERUBAH SESUAI PERKEMBANGAN ZAMAN.

2.2. TEORI GENDER

TEORI NURTURE

- PERBEDAAN PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI HAKEKATNYA HASIL KONSTRUKSI SOSIAL BUDAYA SEHINGGA MENGHASILKAN PERAN DAN TUGAS YANG BERBEDA
- PERBEDAAN MENYEBABKAN PEREMPUAN TERTINGGAL
- KONSTRUKSI SOSIAL MENGHASILKAN PERBEDAAN KELAS, LAKI-LAKI = BORJUIS, PEREMPUAN = PROLETAR
- PEREMPUAN DAPAT BERPERAN MELALUI PROGRAM KHUSUS (AFFIRMATIVE ACTION)

2.2. TEORI GENDER

TEORI NATURE

- PERBEDAAN PEREMPUAN & LAKI-LAKI ADALAH KODRAT, SEHINGGA HARUS DITERIMA**
- PERBEDAAN BIOLOGIS MEMBERIKAN INDIKASI & IMPLIKASI PADA PERAN & TUGAS YANG BERBEDA**
- ALIRAN INI MELAHIRKAN PAHAM STRUKTURAL FUNGSIONAL YANG MENERIMA PERBEDAAN PERAN, ASAL DILAKUKAN SECARA DEMOKRATIS DAN DILANDASI OLEH KOMITMEN**

2.2. TEORI GENDER

TEORI EQUILIBRIUM

- KONSEP KEMITRAAN & KEHARMONISAN DALAM HUBUNGAN ANTARA PEREMPUAN & LAKI-LAKI**
- MEWUJUDKAN KONSEP INI, SETIAP KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN AGAR DIPERHITUNGGAN KEPENTINGAN & PERAN PEREMPUAN & LAKI-LAKI SECARA SEIMBANG**
- SETIAP PIHAK PUNYA KELEBIHAN SEKALIGUS KEKURANGAN, KEKUATAN SEKALIGUS KELEMAHAN YANG PERLU DIISI & DILENGKAPI PIHAK LAIN DALAM KERJASMA YANG SETARA**

2.3. DASAR HUKUM

- **UUD 1945 PASAL PASAL 27 AYAT (1) DAN (2), SERTA BAB XA PASAL 28A, 28 B DAN 28C**
- **UU NO. 7 TAHUN 1984 TENTANG CEDAW**
- **INPRES NO. 9 TAHUN 2000 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL**
- **UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**
- **UU NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**
- **PERMENDAGRI NO 67 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DAERAH;**
- **SURAT EDARAN BERSAMA (SEB) 4 MENTERI: MENTERI PPN/KETUA BAPPENAS, MENKEU, MENDAGRI DAN MENTERI PPPA TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PUG MELALUI PERENCANAAN DAN PENGENGGARAN RESPONSIF GENDER (PPRG)**

POKOK BAHASAN 3

**PERBEDAAN KEBUTUHAN PEREMPUAN
DAN LAKI-LAKI**

3. PERBEDAAN KEBUTUHAN PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI

PERBEDAAN BIOLOGIS DAN PERBEDAAN PERAN, FUNGSI, TANGGUANG JAWAB, SIKAP DAN PERILAKU ANTARA PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI SEBAGAI KONSTRUKSI SOSIAL DAN BUDAYA MELAHIRKAN PERBEDAAN KEBUTUHAN DIANTARA KEDUANYA, YANG DIKLASIFIKASIKAN SEBAGAI KEBUTUHAN SPESIFIK, PRAKTIS DAN STRATEGIS DENGAN FOKUS PADA PEREMPUAN

KEBUTUHAN SPESIFIK

- PEREMPUAN PERLU LEBIH BANYAK ZAT BESI PADA SAAT MENSTRUASI, HAMIL DAN MELAHIRKAN
- PEREMPUAN PERLU PEMBALUT

KEBUTUHAN PRAKTIS

- TOILET PEREMPUAN
- RUANG LAKTASI
- BALAI PERSALINAN
- PENITIPAN ANAK
- RUANG GANTI PAKAIAN

KEBUTUHAN STRATEGIS

- PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB ANTARA PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI
- PENGHAPUSAN REGULASI YANG BIAS GENDER
- PENGUATAN PERAN PEREMPUAN MELALUI REGULASI RESPONSIF GENDER DAN AFFIRMATIVE ACTION

POKOK BAHASAN 4	ISU GENDER
4.1	CIRI ISU GENDER
4.2	CIRI ISU STRATEGIS GENDER

4. ISU GENDER

ISU GENDER ADALAH SUATU KONDISI YANG MENUNJUKKAN KESENJANGAN PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI ATAU KETIMPANGAN GENDER. KONDISI KETIMPANGAN INI DIPEROLEH DENGAN MEMBANDINGKAN KONDISI YANG DICITA-CITAKAN (KONDISI NORMATIF) DENGAN KONDISI GENDER SEBAGAIMANA ADANYA (KONDISI SUBYEKTIF)

4.1. CIRI ISU GENDER

- **MENYANGKUT RELASI/KONDISI PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI**
- **ADANYA KETIMPANGAN AKSES, MANFAAT, PARTISIPASI DAN KONTROL ANTARA PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI**
- **ADANYA KETIDAKADILAN YANG DIALAMI PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI DALAM BENTUK MARGINALISASI, SUB ORDINASI, STEREOTYPE, BEBAN KERJA MAUPUN KEKERASAN**
- **ADANYA UNSUR PENGARUH BUDAYA DAN KEBIJAKAN**

4.2. CIRI ISU STRATEGIS GENDER

- **ADANYA KETIDAKADILAN GENDER**
- **MENDESAK UNTUK SEGERA DISELESAIKAN**
- **PENYELESAIAN BERDAMPAK POSITIF PADA PADA ISU GENDER LAINNYA**
- **BERORIENTASI PADA PERUBAHAN SISTEMIK RELASI/KONDISI PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI**
- **ADANYA PENGARUH BUDAYA DAN KEBIJAKAN**

POKOK BAHASAN 5	INTEGRASI GENDER MELALUI STRATEGI PENGARUSUTAMAAN GENDER MAUPUN AFFIRMATIVE ACTION
5.1	PENGERTIAN
5.2	MANFAAT PUG
5.3	INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2000

5. INTEGRASI GENDER MELALUI STRATEGI PENGARUSUTAMAAN GENDER MAUPUN AFFIRMATIVE ACTION

PENGARUSUTAMAAN GENDER ADALAH STRATEGI YANG DIBANGUN UNTUK MENINTEGRASIKAN GENDER MENJADI SATU DIMENSI INTEGRAL DARI PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI ATAS KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN, YANG BERTUJUAN UNTUK MEWUJUDKAN KESETARAAN DAN Keadilan GENDER.

KESETARAAN GENDER BERMAKNAKESAMAAN KONDISI DAN POSISI PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI DALAM MEMPEROLEH KESEMPATAN DAN HAK-HAKNYA UNTUK BERPERAN DAN BERPARTISIPASI DAN PEMBANGUNAN.

Keadilan GENDER BERMAKNA PERLAKUAN ADIL BAGI PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI DALAM KESELURUHAN PROSES KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN PENGALAMAN, KEBUTUHAN, KESULITAN DAN HAMBATAN SEBAGAI PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI

AFIIRMATIVE ACTION ADALAH PENGEMBANGAN PROGRAM KHUSUS (PEMBERDAYAAN PEREMPUAN) DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESETARAAN GENDER DALAM BIDANG PEKERJAAN DAN PEMBANGUNAN

CONTOH PUG

- **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN BAGI PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI**
- **PEMBANGUNAN PUSAT PERBELANJAAN SUDAH MEMPERHITUNGGAN RUANG PUBLIK UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN SPESIFIK PEREMPUAN**

CONTOH AFFIRMATIVE ACTON

- **DIKLAT KEPEMIMPINAN BAGI PEREMPUAN YANG POTENSIAL MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL**
- **30 % KUOTA CALON LEGISLATIF PEREMPUAN**
- **1 ORANG PEREMPUAN ANGGOTA BPD**
- **30 % PEREMPUAN YANG HADIR DALAM MUSRENBANGDES**

5.2. MANFAAT PUG

- MEMPEROLEH AKSES YANG SAMA KEPADA SUMBERDAYA PEMBANGUNAN ;**
- BERPARTISIPASI YANG SAMA DALAM PROSES PEMBANGUNAN, TERMASUK PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN ;**
- MEMILIKI KONTROL YANG SAMA ATAS SUMBER DAYA PEMBANGUNAN; DAN**
- MEMPEROLEH MANFAAT YANG SAMA DARI HASIL PEMBANGUNAN;**

5.3. INSTRUKSI PRESIDEN 9/2000

KEPADA

- MENTERI;
- KEPALA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN;
- PIMPINAN KESEKRETARIATAN LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA;
- PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA;
- KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA;
- JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA;
- GUBERNUR;
- BUPATI/WALIKOTA

***UNTUK MELAKSANAKAN STRATEGI PUG
DALAM PEMBANGUNAN***

POKOK BAHASAN 6	KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
6.1	TUGAS DAN FUNGSI POKJA PUG
6.2	KOMPONEN AWAL PUG
6.3	IMPLEMENTASI PUG

6. KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)

KELEMBAGAAN PUG DIBENTUK BERUPA KELOMPOK KERJA (POKJA) PUG YANG DIKETUI OLEH KEPALA BAPPEDA, MAUPUN FOCAL POINT PUG. POKJA PUG ADALAH WADAH KONSULTASI BAGI PELAKSANA DAN PENGGERAK PUG DARI BERBAGAI INSTANSI/LEMBAGA DI DAERAH. FOCAL POINT PUG ADALAH INDIVIDU-INDIVIDU YANG TELAH SENSISITIF GENDER YANG BERASAL DARI BERBAGAI INSTANSI/LEMBAGA DI DAERAH YANG MEMPU MELAKSANAAN PUG DALAM KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.

TUGAS POKJA PUG

- **MEMPROMOSIKAN DAN MEMFASILITASI PUG KEPADA SETIAP PERANGKAT DAERAH**
- **MELAKSANAKAN SOSIALISASI PUG KEPADA KAB/KOTA**
- **MENDORONG TERWUJUDNYA PERENCANAAN YANG RESPONSIF GENDER**
- **MENYUSUN PROFIL GENDER**
- **MELAKUKAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PUG DI PERANGKAT DAERAH DAN KAB/KOTA**
- **MENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH PUG**

FUNGSI POKJA PUG

- **MENGIDENTIFIKASI DAN MENGAJAI ISU GENDER PADA BIDANG PEMBANGUNAN**
- **MENGEMBANGKAN KIE UNTUK PUG**
- **MENGEMBANGKAN MODEL PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER**
- **MELAKSANAKAN IMPLEMENTASI PROGRAM DAN KEGIATAN PUG**
- **FASILITASI DAN ADVOKASI PROGRAM DAN KEGIATAN PUG**

6.2. KOMPONEN AWAL PUG

- 1. KOMITMEN;**
- 2. KEBIJAKAN DAN PROGRAM;**
- 3. KELEMBAGAAN PUG TERMASUK
UNIT-UNIT KERJA
STRUKTURAL/FUNGSIONAL**
- 4. SUMBER DAYA MANUSIA,
PENDANAAN DAN PRASARAN YANG
MEMADAI**
- 5. KETERSEDIAAN DATA TERPILAH
BERDASARKAN JENIS KELAMIN**
- 6. INSTRUMEN ANALISIS GENDER.**
- 7. DUKUNGAN MASYARAKAT (CIVIL
SOCIETY)**

6.3. IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER (PERPRES 9/2000)

NO	KOMPONEN	KELUARAN	ALAT	KEGIATAN
1	KOMITMEN	<ol style="list-style-type: none"> 1. PERDA 2. PERGUB 3. KEPGUB 	<ol style="list-style-type: none"> 1. NASKAH AKADEMIS 2. PROLEGDA 3. PEDOMAN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PENYUSUNAN NA 2. WORKSHOP 3. SOSIALISASI
2	KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. PPRG 2. ARG 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PEDOMAN PPRG 2. PEDOMAN ARG 	<ol style="list-style-type: none"> 1. DIKLAT 2. TOT 3. ADVOKASI
3	KELEMBAGAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. POKJA PUG 2. FOCAL POINT 3. UNIT OPD 	PEDOMAN PUG	<ol style="list-style-type: none"> 1. BIMTEK 2. ADVOKASI
4.	SUMBER DAYA	<ol style="list-style-type: none"> 1. PERSONIL 2. DANA & FASILITAS 	MODUL DIKLAT/BIMTEK	<ol style="list-style-type: none"> 1. DIKLAT/BIMTEK 2. TOT 3. ADVOKASI
5.	DATA DAN SISTEM INFORMASI	<ol style="list-style-type: none"> 1. BUKU STATISTIK YANG TERPILAH 2. TERSEDIAANYA SIM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PEDOMAN PENYUSUNAN STATISTIK GENDER 2. PEDOMAN DATA TERPILAH 	<ol style="list-style-type: none"> 1. FGD 2. KAJIAN 3. WORKSHOP 4. DISEMINASI
6.	INSTRUMEN/TOOL	<ol style="list-style-type: none"> 1. ALAT ANALYSIS 	PANDUAN, MODUL DLL	<ol style="list-style-type: none"> 1. FGD 2. KAJIAN 3. WORKSHOP 4. DISEMINASI
6.	CIVIL SOCIETY	<ol style="list-style-type: none"> 1. JEJARING 2. PENGAWASAN 3. PEMBINAAN 	PEDOMAN PARTISIPASI MASYARAKAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. FGD 2. KAJIAN 3. WORKSHOP 4. SOSIALISASI

**LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
MEMANG BEDA,
NAMUN TIDAK BOLEH
DIBEDA-BEDAKAN**

**TERIMA
KASIH**